

Etika Politik di Era Reformasi Kajian Perspektif Islam

*Oleh: Abd. Madjid AS.**

Abstrak

Era reformasi di negeri ini telah berjalan lima tahun lebih, namun krisis multidimensi tak kunjung usai, bahkan persoalan bangsa semakin kompleks dan rumit. Disintegrasi bangsa mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), supremasi hukum tidak tegak, kemiskinan dan pengangguran meluas, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin merata dan menggurita.

Di atas panggung politik nasional muncul politikus busuk, oportunis dan preman politik. Berbagai gejala distortif, pembusukan politik semakin nampak jelas kasat mata. Syahwat politik elite politik sangat kuat, namun miskin hati nurani, memburu kekuasaan dengan segala cara: pemalsuan ijazah, money politics, kebohongan publik, kekerasan politik, korupsi, bahkan persengkokolan mereproduksi undang-undang. Hampir seluruh anggota DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Dunia politik dijadikan sebagai lahan perebutan kekuasaan, mengeruk uang dan kekayaan, bukan sebagai medan pengabdian bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kondisi carut-marut yang serba paradoks dengan cita-cita reformasi tersebut merupakan suatu fenomena sosial politik yang menarik dan menantang untuk dielaborasi. Mengingat begitu tinggi dan sentralnya kedudukan etika dalam pandangan agama-agama dunia, maka penelitian ini hanya menfokuskan pada masalah etika politik di era reformasi dalam perspektif Islam.

Kata kunci: etika politik, era reformasi, islam

A. Pendahuluan

Antiklimaks dari gelombang aksi mahasiswa terjadi pada tanggal 21 Mei 1998 yang berakibat jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya dan lahirlah era reformasi.¹ Lahirnya era reformasi pada Mei 1998 mengemban cita-cita luhur memperbaiki tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, berkeadilan dan sejahtera. Dengan era reformasi bangsa Indonesia memasuki pintu gerbang

* Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹ Selo Sumardjan, *Menuju Indonesia Baru*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), p. 50. Lihat pula, Hariman Siregar, *Gerakan Mahasiswa Pilar ke-5 Demokrasi*, (Jakarta: Teplok Press, 2003), p. 34.

Indonesia baru menuju cita-cita proklamasi, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Era reformasi telah berjalan lima tahun lebih, namun krisis multidimensi tak kunjung selesai, persoalan bangsa ini semakin kompleks dan rumit, desintegrasi bangsa mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), supremasi hukum tidak tegak, bahkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) semakin meluas dan menggurita.

Akar masalah yang menimbulkan kondisi yang serba paradoks dengan cita-cita reformasi tersebut adalah merosotnya etika politik dan etika berbangsa. Kemerosotan etika politik dan etika berbangsa itu menjadi suatu fenomena yang sangat menarik ketika terjadi dalam era reformasi dan dikaitkan dengan Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2002 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang mencakup enam bidang: etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika hukum dan peradilan, etika profesi dan keilmuan dan etika lingkungan.² Kemerosotan etika politik dalam era reformasi yang nyata-nyata bertentangan dengan cita-cita reformasi itu dipandang sebagai suatu fenomena yang menarik dan menantang untuk dielaborasi.

B. Realitas Etika Politik di Era Reformasi

Di era reformasi ini muncul gejala sosial politik yang memprihatinkan yakni pembusukan politik. Perpolitikan nasional ditandai dengan berbagai proses *distortif*, antara lain ditandai dengan penyebaran politikus busuk, politikus hitam atau politikus tercela di atas pentas kekuasaan negeri ini. Mereka justru yang selama ini ditengarai memainkan peran penting dalam pentas politik nasional. Semakin berkobarnya syahwat politik sebagian anggota masyarakat dan semakin mudarnya idealisme terhadap perbaikan bangsa ini secara menyeluruh, politik telah menjadi mata pencaharian melalui jalan pintas yang serba menerobos. Terbongkarnya berbagai kasus penggunaan ijazah palsu politikus adalah di antara indikator betapa semakin rancunya suasana moral sebagian masyarakat.

Oportunisme bahkan premanisme politik sudah semakin melanda kehidupan bangsa ini, apalagi pada minggu terakhir menjelang Pemilu 2004 berbagai protes kasus dalam bentuk demo dan ungkapan kasar terhadap pemimpin partai sungguh terkait dan dirasakan di berbagai

² Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), p. 15. Lihat pula, K. Bertens, *Perspektif Etika: Esai-esai tentang Masalah Aktual*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), p. 45.

daerah. Lebih ironis lagi terjadinya politik uang yang jelas dapat merusak tatanan demokrasi yang kuat dan sehat yang dicita-citakan bersama.

Setelah reformasi, praktik korporatisme negara bisa dihentikan, dan kemudian memungkinkan rakyat Indonesia bisa membangun korporatisme masyarakat yang ditandai dengan besarnya peran partai politik. Namun sayangnya, setelah partai politik memainkan peran penting dan mendominasi perubahan berbagai aspek kehidupan tampak partai tidak merepresentasikan diri sebagai alat memperjuangkan aspirasi rakyat. Partai lebih banyak merepresentasikan aspirasi dan kepentingan elite politiknya sendiri, sehingga gejala oligarkis membayangi proses-proses pengambilan keputusan di level partai. Sementara elite politik partai lebih tunduk kepada syahwat politiknya sendiri ketimbang mendengarkan jeritan aspirasi konstituen mereka. Gejala yang muncul setelah reformasi, praktik negara yang otonom itu dilakukan oleh partai politik. Elite politik cenderung menafikan aspirasi “arus bawah”. Konflik meluas di beberapa daerah akibat kasus pencalonan legislatif, pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Menurut Arief Budiman, yang dimaksud politikus busuk adalah politikus yang pernah terlibat dalam kasus korupsi, pelanggaran hak azasi manusia dan pelanggaran moral. Munir (alm), mantan Ketua Kontras menyatakan bahwa politikus busuk termasuk “politikus berdarah” mereka yang pernah terlibat dalam kekerasan berdarah.³

Antonius Sujata, Ketua Komisi Ombudsman, mengatakan kriteria politikus busuk antara lain terlibat *money politics*, tersangkut tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya, pecandu narkoba, sering mangkir menghadiri sidang, selingkuh, membuat kebijakan atau peraturan yang menguntungkan diri pribadi dengan membebani masyarakat, tidak melaporkan secara benar kekayaan yang dimiliki, tidak melaksanakan kewajiban hukum dan suka berfoya-foya.⁴

Pimpinan Pusat Aisyiyah merekomendasikan para perempuan untuk tidak memilih politisi bermasalah. Kategori politisi bermasalah antara lain melanggar HAM, merusak lingkungan, melakukan KKN, melakukan pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta terlibat dalam masalah pidana.⁵

Politikus busuk adalah mereka yang melawan hukum, sengaja atau tidak, melanggar etika, kepatutan serta norma susila, sosial, dan agama. Elite politik seharusnya menjadi pelaku pencerahan dan mendorong terjadinya perubahan. Namun, lapisan ini tampak lagi berada di tangan

³ Tempo, 18 Januari 2004, p. 17.

⁴ *Ibid.*

⁵ Kedaulatan Rakyat, 29 Maret 2004, p. 16.

politikus yang memiliki komitmen yang besar untuk membangun demokrasi, budaya politik yang membebaskan masyarakat dari krisis. Kekuasaan elite politik yang miskin idealisme itu begitu besar sehingga menyingkirkan elite politik yang memainkan peran kritis.⁶

Tindakan politikus busuk sudah mengarah kepada praktek a-susila atau kemesuman yang tidak hanya ekuivalen dengan prostitusi yang dilakukan power elite, tetapi lebih luas lagi dalam wujud tindakan tanpa landasan etik, korupsi dan kadang-kadang melakukan praktek-praktek ilegal secara sistematis dan terlembaga yang kemudian menodai demokrasi. Ditambah dengan praktek-praktek kekerasan yang antara lain melibatkan elite politik semakin meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat kepada elite politik. Masyarakat tidak lagi memiliki tokoh yang bisa dipercaya karena integritas moral, visi dan kompetensinya dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan ke pundak mereka.

Menurut Zaenudin Maliki, telah terjadi proses pembusukan politik di era reformasi yang ditandai dengan munculnya politikus busuk, hilangnya kepekaan moral elite politik, hilangnya kepercayaan kepada pemimpin menjadikan masyarakat bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Pembusukan politik ini diperparah dengan adanya budaya damai dengan penyimpangan dan kekerasan politik.⁷

Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme belum dilaksanakan secara maksimal, antara lain, seperti kasus BLBI. Bahkan terjadi peningkatan korupsi, kolusi, dan nepotisme baik di pusat maupun di berbagai daerah (TAP MPR Nomor VI/MPR/2002).

Ternyata “virus” korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak mudah diberantas oleh pemerintah reformasi, meski pembaruan total di negara Indonesia telah dilaksanakan. Virus korupsi cepat merebak.⁸ Sekurangnya 929 kasus penyimpangan terhadap semua jenis anggaran dalam pengelolaan keuangan negara untuk tahun anggaran 2000 ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan. Ditaksir, penyimpangan temuan BPK itu mencapai Rp. 165,85 trilyun atau 70,93 persen dari total realisasi anggaran Rp. 233,816 trilyun yang diperiksa BPK. Deviasi keuangan ini terkait dengan penyimpangan terhadap penghematan dan efisiensi.⁹

Hutang luar negeri/bantuan luar negeri dari negara-negara donor, dan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia banyak yang dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung

⁶ Zaenudin Maliki, *Politikus Busuk*, (Yogyakarta: Bentang Press, 2004), p. 5.

⁷ *Ibid.*, p. 23.

⁸ William Chang, *Kerikil-kerikil di Jalan Reformasi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), p. 41.

⁹ Kompas, 27 Oktober 2000, p. 1.

jawab. Tingkat kebocoran ini cukup signifikan, menurut begawan ekonomi Indonesia Sumitro Djojohadikusumo, mencapai 30% dari total anggaran pembangunan.¹⁰

Jeffery A. Winters seorang ekonom dari AS mengemukakan bahwa paling tidak sepertiga dari bantuan Bank Dunia untuk Indonesia bocor di birokrasi Indonesia. Dalam survey Transparency International terhadap negara Indonesia ditemukan bahwa Negara Indonesia menempati negara terkorup peringkat ke-6, dan di antara negara Asia berada pada peringkat pertama.¹¹

Di berbagai daerah Indonesia, baik propinsi maupun kabupaten (kota), belakangan marak gerakan rakyat anti korupsi. Kalau biasanya gerakan anti korupsi tertuju ke eksekutif, belakangan aksi massa menentang tindak pidana korupsi lebih terarah ke DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten (kota), sebagai contoh adalah diajukan dan dipenjarakannya sejumlah anggota DPRD Sumbar, Padang, Banda Aceh, Palembang, Bandar Lampung, Payakumbuh, Singkawang, Pontianak, Ciamis, Garut, Kudus, Kendari, dan lain-lain.

Citra buruk bangsa Indonesia sebagai salah satu negara paling korup di dunia, membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahnya sendiri. Kredibilitas dan akuntabilitas pemerintah luntur di mata warganya sendiri. Sama halnya dengan lunturnya kepercayaan pemerintah dan masyarakat manca negara terhadap bangsa dan negara Indonesia.¹²

Sebagaimana sudah sering diberitakan pers nasional dan asing, sejumlah lembaga pemerintah dan swasta yang prestasi akurasi penilaiannya tidak diragukan, menuding Indonesia sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Transparency International yang berpusat di Berlin Jerman, menyebut Indonesia sebagai negara paling korup ke enam di dunia, di antara 133 negara di dunia.

Dari waktu ke waktu, tindak pidana korupsi di negara kita, apakah di sektor negara atau swasta, mengalami peningkatan. Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) dalam sebuah jumpa pers pada hari Jum'at 17 September 2004 di hotel Maharani Jakarta mengatakan bahwa Anggaran DPRD di delapan belas daerah di Indonesia diduga dikorupsi oleh anggota DPRD dan aparat Pemda. Total uang yang dikorupsi mencapai Rp. 450 miliar. Modusnya mirip-mirip, yaitu melanggar ketentuan PP Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan dan Keuangan DPRD.¹³

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Kedaulatan Rakyat, 6 Juli 2004, p. 10.

¹³ Kedaulatan Rakyat, 18 September 2004, p. 1.

Sebagai gambaran maraknya tuntutan publik yang mendesak proses hukum terhadap institusi maupun anggota DPRD, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Sudhono Iswayuhdi menegaskan, saat ini sudah ada 24 kasus indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan DPRD secara institusi maupun perorangan yang sudah masuk pengadilan. Sedangkan belasan kasus lainnya masih dalam proses penyelidikan.

Angka tersebut menunjukkan keseriusan Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntutan kasus-kasus korupsi. Sebab perilaku KKN itu mengakibatkan ketidakadilan di masyarakat dan menimbulkan sifat munafik. Selain itu yang lebih berbahaya lagi, perilaku KKN akan menyebabkan degradasi moral sehingga perbuatan seperti itu dianggap hal biasa.

Dari pengusutan kasus-kasus korupsi yang terjadi di DPRD di Indonesia, kecenderungan korupsi dilakukan sejak dari tahap perencanaan anggaran seperti pengajuan proyek-proyek yang tidak perlu ataupun proyek-proyek yang sebenarnya sudah ada, sehingga pada tahap pelaksanaan diwarnai kegiatan fiktif.¹⁴

Adapun bentuk korupsi, setidaknya ada empat bentuk korupsi yang ciri strukturalnya menonjol. Pertama, *korupsi jalan pintas* yaitu dalam kasus-kasus penggelapan uang negara, perantara ekonomi dan politik untuk keuntungan politik. Kedua, *korupsi upeti*, yaitu bentuk korupsi yang dimungkinkan karena jabatan strategis. Berkat jabatan tersebut seseorang mendapatkan persentase dari berbagai kegiatan, baik ekonomi, politik, budaya bahkan upeti dari bawahan, kegiatan lain atau jasa dalam suatu perkara. Keempat, *korupsi pemerasan*, yang sangat terkait dengan jaminan keamanan dan unsur-unsur gekolak intern maupun dari luar.¹⁵

Kalau KKN dan kekerasan hidup subur dalam politik, dia membentuk budaya politik yang kalau meluas, dapat juga mengubah kebudayaan. Tanpa ada perlawanan dan kritik terhadap praktek-praktek tersebut, maka KKN dan kekerasan dalam suatu budaya politik akan diterima sebagai bagian kebudayaan dan bukan sekedar penyelewengan kebudayaan.¹⁶

Realitas kekerasan yang terjadi pada masa transisi secara selintas seolah implikasi dari transisi, dalam hal ini akibat terjadinya benturan antara sisa-sisa kekuatan rezim lama yang terdislokasi yang sedang berjuang untuk melakukan "Relokasi" politik maupun ekonomi. Jika melihat intensitas dan lingkup kekerasan yang begitu luas yang terjadi

¹⁴ Kedaulatan Rakyat, 24 Agustus 2004, p. 1.

¹⁵ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), p. 124.

¹⁶ Kedaulatan Rakyat, 14 September 2004, p. 1.

selama ini mengisyaratkan bahwa kekerasan di negeri ini adalah sebuah implikasi yang lebih kompleks daripada sekedar proses pertarungan jabatan antara rezim lama dengan rezim baru, bahkan juga bukan sekedar implikasi dari perebutan kursi antar elite baru yang sedang marak saat ini dalam sejarah kepolitikan Indonesia. Kekerasan di negeri ini telah menyangkut persoalan kultural dan sekaligus struktural, yang cara pengentasannya tidak cukup melalui cara-cara konvensional resolusi konflik, melainkan memerlukan resolusi konflik yang dilandasi oleh penataan sistem nilai, moralitas dan pembentukan berbagai bentuk modal sosial, sekaligus distribusi dan alokasi struktural yang kompleks.

Kekerasan yang membuat sejarah negeri ini menjadi begitu kelam, agaknya belum bisa dihindarkan dari proses kepolitikan negeri ini, meski perubahan dramatis telah terjadi akhir 1990-an. Kekerasan begitu banyak muncul kepermukaan, baik ketika negara dalam keadaan kuat seperti pada masa rezim Orde Baru, dan juga setelah memasuki era reformasi dimana negara dan hampir semua aparturnya dalam posisi lemah, antara lain karena mengalami delegitimasi.¹⁷

Kekerasan terasa begitu kental dan berkaitan dengan elite penguasa, sehingga orang dengan begitu gampang menyimpulkan sebagai kekerasan elite. Seperti peristiwa menjelang Sidang Umum MPR tahun 1999 ketika berhadapan massa pendukung presiden Habibie dengan massa pendukung fanatik Megawati ditandai dengan cap jempol darah. Demikian pula kasus-kasus yang terjadi menjelang dan selama Sidang Istimewa MPR pelengseran KH. Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan yang memunculkan fenomena pasukan berani mati. Lebih eronis lagi di dalam gedung MPR, anggota majelis yang terhormat bertengkar, saling menuduh, saling menghujat dengan kata-kata dan bahasa yang jauh dari etika dan tidak layak keluar dari mulut seorang anggota majelis yang terhormat.

Di era reformasi masyarakat nampak dalam waktu yang relatif singkat telah berubah dari “mensakralkan” budaya harmoni, tiba-tiba tidak lagi sensitif dalam memahami makna budaya harmoni itu sendiri. Masyarakat termasuk di dalamnya elite politiknya nampak lebih gampang memahami dan mempraktekkan budaya dualisme. Setiap persoalan didekati tidak dengan akal sehat, cara-cara berpikir yang jernih, melainkan menggunakan kekerasan dan atau gontok-gontokan. Logika kekerasan kemudian menyebar cepat bagaikan virus menggerogoti logika massa. Virus jahat dan kekerasan itu mengikis habis serum keramahan, kesantunan dan etika individual maupun etika sosial.¹⁸

¹⁷ Zaenuddin Maliki, *Politikus Busuk*, p. 34

¹⁸ *Ibid.*, p. 40.

Eskalasi kekerasan dan kerusakan massa berdimensi politik menjelang dan selama masa kampanye Pemilu 1999 cenderung meningkat. Salah satu kasus kekerasan politik terjadi di Desa Dongos Jepara pada tanggal 30 April 1999. Amuk massa yang melibatkan ribuan orang, mengakibatkan lima orang meninggal dunia. Insiden kekerasan politik itu bermula dari pengepungan ribuan massa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dilengkapi senjata tajam, terhadap pendukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dalam acara deklarasi PKB di Desa Dongos Jepara. Massa PKB yang hendak keluar dan masuk lokasi tersebut mengalami kesulitan. Makin lama, suasana sekitar lokasi makin panas. Terjadi saling dorong, hingga berakhir dengan amuk massa.¹⁹

Kekerasan politik yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta juga masih terjadi pada masa menjelang dan pasca Pemilu 2004. Kasus kekerasan politik yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa antara lain bentrokan antara massa pendukung partai di Buleleng yang mengakibatkan tewasnya tiga orang dan menimbulkan suasana ketakutan dan pengungsian.²⁰

Kekerasan yang sulit dibongkar ialah kekerasan psikologi yang dipakai dalam sistem sosial politik. Bentuk kekerasan ini biasanya secara sistematis dipraktikkan oleh penguasa-penguasa totaliter untuk melawan kelompok disiden, lawan politik, melemahkan atau meniadakan oposisi, dan mengorek informasi, juga kelompok mayoritas terhadap minoritas. Selain itu kecenderungan kelompok-kelompok radikal juga memakai model kekerasan ini. Jenis ini biasanya juga digunakan untuk melatih militer atau kelompok para militer dan teroris. Sebagai alat cuci otak, kekerasan bisa membentuk semangat korp, menjunjung tinggi kode kehormatan, merendahkan dan melecehkan musuh, membuat militan dan fanatik. Kekerasan bisa digunakan menjadi alat teror.²¹

C. Etika Politik dalam Islam

Beberapa prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan sebagai landasan etika politik adalah:

1. Kejujuran

يأياها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين²²

¹⁹ Gatra, 8 Mei 1999, p. 17.

²⁰ Kedaulatan Rakyat, 3 Maret 2004, p. 1.

²¹ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, p. 49

²² Al-Taubah: 119.

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur”

Al-Imam Muhammad Abduh ketika menafsirkan ayat tersebut mengatakan bahwa *as-shadiqun* adalah orang-orang yang berpegang kepada kejujuran dan ikhlas ketika berjuang, jujur ketika berjanji, jujur dalam ucapan, jujur dalam bertaubat ketika melakukan dosa atau kesalahan. Sedang orang-orang *munafiq* adalah sebaliknya.²³

2. Amanah

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى أهلها...²⁴

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu sekalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya...*”

Amanah adalah sesuatu yang harus dilindungi untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Orang yang melindungi dan menyampaikan amanat kepada yang berhak disebut orang yang amanah, sedang orang yang tidak melindungi dan tidak menyampaikan amanah kepada yang berhak disebut pengkhianat.²⁵ Menunaikan amanat dan berlaku adil merupakan amal saleh yang bernilai paling tinggi.

Amanat itu sendiri empat macam, yaitu *pertama*, amanat manusia terhadap Tuhannya, yaitu kesanggupan manusia untuk beribadah hanya kepada-Nya, taat melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan-Nya, mempergunakan jiwa dan negaranya dalam segala hal yang bermanfaat dan dapat mendekatkan kepada Tuhannya. Karena sesungguhnya segala bentuk kemaksiatan merupakan pengkhianatan kepada Allah SWT. *Kedua*, amanat manusia terhadap sesama manusia, antara lain kewajiban manusia kepada sesama manusia, kewajiban manusia kepada keluarga, sanak kerabat, sesama warga negara, kewajiban manusia kepada pemerintah dan kewajiban pemerintah kepada rakyatnya, termasuk kewajiban ulama kepada umatnya. *Ketiga*, amanat manusia kepada dirinya sendiri, yaitu tidak memilihkan bagi dirinya kecuali sesuatu yang lebih maslahat dan lebih manfaat bagi dirinya baik urusan agama atau urusan dunia, tidak melakukan suatu perbuatan yang membahayakan bagi dirinya baik di dunia maupun di akhirat, dan menjaga kesehatan dari berbagai macam penyakit. *Keempat*, amanat manusia kepada alam. Sumber daya alam diciptakan oleh Allah sebagai fasilitas bagi manusia agar dapat melaksanakan peran gandanya baik sebagai hamba Allah maupun sebagai

²³ Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.), p. 73

²⁴ An-Nisa': 58.

²⁵ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1974), p. 69.

khalifah Allah untuk kemaslahatan dan kemakmuran kehidupan di muka bumi, tidak untuk kerusakan dan kesengsaraan.²⁶

Dalam konteks kenegaraan, amanah dapat berupa kekuasaan ataupun kepemimpinan. Sebab, pada prinsipnya, kekuasaan atau kepemimpinan adalah suatu bentuk pendelegasian atau pelimpahan wewenang orang-orang yang dipimpinya. Berhubung bahwa kekuasaan adalah amanat, maka Islam secara tegas melarang terhadap para pemegang kekuasaan melakukan *abuse* atau penyalahgunaan kekuasaan yang diamanatkannya. Karena itu, pemegang kekuasaan atau pemimpin wajib berlaku adil dalam arti yang sesungguhnya. Sebab, apapun yang dilakukan oleh seorang penguasa ataupun pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ibnu Khaldun, seorang sosiolog muslim, malah mengatakan dalam "Muqaddimah" bahwa pemimpin/penguasa pada hakikatnya adalah perwakilan atas nama pemegang syariat untuk melindungi agama dan menata dunia.²⁷

3. Keadilan

اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون²⁸

"Berlaku adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu lakukan"

Menegakkan keadilan merupakan amal salih yang paling tinggi nilainya disamping amanah. Ajaran Islam yang mengandung nilai etika politik adalah menegakkan keadilan terhadap sesama manusia. Dalam Islam jelas dinyatakan bahwa menunaikan amanat dan keadilan merupakan pilar utama bagi tata politik yang berkeadilan dan kekuasaan yang ideal.

4. Kesantunan

Kasih sayang, kelembutan, kesantunan, dan kearifan merupakan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad saw. ketika dalam suatu peperangan dengan orang kafir ada seseorang yang meminta kepada Nabi agar melaknati orang-orang kafir, maka Nabi menolaknya.

²⁶ *Ibid.*, p. 70. Lihat, Fazlurrahman, *Tema Pokok al-Qur'an*, alih bahasa Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka, 1995), p. 115.

²⁷ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, (t.p.: Dar al-Fikr, tt.), p. 126. Lihat pula, Faisal Ba'asir, *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2003), p. 145.

²⁸ Al-Ma'idah: 8.

Fakta sejarah yang paling monumental yang membuktikan kesantunan Nabi Muhammad termasuk kepada lawan politiknya adalah “*fathu Makkah*” (penaklukan Makkah) secara damai, tanpa kekerasan. Padahal selama puluhan tahun Nabi dihina, dianiaya, diteror, bahkan akan dibunuh. Namun demikian beliau tidak melampiaskan kedendamannya dengan melakukan kekerasan meskipun memiliki kekuatan. Dalam kondisi yang demikian, sulit dibayangkan untuk tidak melakukan politik balas dendam dan pembumihangusan.

Dalam berdakwah menyeru ke jalan kebenaran pun harus mengedepankan kebijakan dan kesantunan, apalagi hanya di dalam masalah politik. Kesantunan merupakan etika para Nabi dan Rasul. Kesantunan harus senantiasa dikedepankan dalam menghadapi lawan-lawan politik yang dhalim dan kafir sekalipun. Al-Maraghi menyatakan “Tidak ada kesantunan yang lebih disukai Allah daripada kesantunan dan belas kasih seorang pemimpin, dan tidak ada kebodohan yang lebih dimurkai Allah daripada kebodohan dan kebingungan seorang pemimpin.”²⁹

Membangun budaya politik santun berarti membangun kondisi politik yang manusiawi. Kondisi politik semacam ini hanya mungkin bila setidaknya memenuhi dua syarat: menghormati pluralitas (memberdayakan rumah publik) dan tidak membungkam ingatan sosial. Yang dimaksud dengan ruang publik adalah ruang kebebasan politik dan kesamaan. Ini tercipta bila warga negara bertindak bersama dalam koordinasi melalui wicara dan persuasi, bukan dengan kekerasan atau intimidasi. Selama itu, ruang publik juga berarti semua bentuk institusi dan lingkup yang memberi konteks bagi kegiatan warga negara. Dengan demikian ruang publik merupakan sarana untuk menyingkapkan identitas warga negara. Dalam perspektif ini, politik lalu menjadi seni untuk mengabdikan diri manusia. Negarawan dan peristiwa-peristiwanya akan dicatat dan diingat oleh sejarah berkat prestasi dan jasanya bagi bangsa. Politik menjadi sarana untuk mewujudkan prinsip-prinsip kebebasan, kesatuan, keadilan, dan solidaritas. Dengan demikian, keutamaan dalam politik dilihat dari kesetaraan yang memungkinkan pengakuan timbal balik dan hubungan fair di antara para pelakunya.³⁰

D. Etika Para Politisi Era Reformasi dalam Perspektif Islam

Dari fakta munculnya fenomena politikus busuk dan pembusukan politik di era reformasi, meluas dan mengguritanya korupsi, kolusi dan

²⁹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, p. 113.

³⁰ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, p. 182.

nepotisme, dan merebaknya kekerasan politik di tanah air, dapatlah dianalisis secara induktif bahwa secara kualitatif telah terjadi kemerosotan etika politik di era reformasi.

Ibnu Khaldun seorang sosiolog muslim, mengemukakan teori *perwakilan*. Bahwa setiap pemimpin/penguasa pada hakekatnya adalah perwakilan atas nama pemegang syariat untuk menjaga agama dan menata dunia. Segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh elite politik baik yang berupa penyalahgunaan wewenang, KKN, kekerasan dan sebagainya dapat dipandang sebagai penghujatan terhadap amanat yang dipercayakan kepadanya.³¹

Etika politik tidak hanya masalah perilaku politik. Ia berhubungan juga dengan praktek institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, ekonomi. Etika politik memiliki tiga dimensi, tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri.

Perilaku politik hanya salah satu dimensi etika politik. Kehendak baik perlu ditopang institusi yang adil. Kehendak baik berfungsi mempertajam makna tanggung jawab, sedang institusi (hukum, aturan, kebiasaan, lembaga sosial) berperan mengorganisir tanggung jawab.³²

Etika politik mengandung aspek individual dan sosial. Di satu pihak, etika politik sekaligus adalah etika individual dan etika sosial. Etika individual karena membahas masalah kualitas moral pelaku, dan etika sosial karena merefleksikan masalah hukum, tatanan sosial, dan institusi yang adil. Di pihak lain, etika politik sekaligus etika institusional dan etika keutamaan. Institusi dan keutamaan merupakan dua dimensi etika yang saling mendukung. Keutamaan merupakan faktor stabilisasi tindakan yang berasal dari dalam diri pelaku, sedangkan institusi menjamin stabilitas tindakan dari luar diri pelaku.

Pandangan bahwa politik itu kotor tidak sepenuhnya benar, karena kekuasaan sesungguhnya mempunyai makna yang luhur, dan kekuasaan adalah amanat yang hanya dapat dipenuhi oleh seseorang yang luhur budinya dan oleh karenanya harus diperebutkan dengan cara-cara yang baik, luhur dan santun. Begitu luhurnya makna kekuasaan itu, sehingga pemegang kekuasaan diharuskan mempunyai syarat-syarat yang tidak mudah diperoleh setiap orang begitu saja, seperti harus adil, cerdas, sehat jasmani dan rohani, bijaksana, santun, bahkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.³³

Politik sebagai ilmu ataupun seni untuk memperebutkan dan memperoleh dan membagi kekuasaan dalam sistem pemerintahan,

³¹ Faisal Ba'asir, *Etika Politik*, p. 145.

³² Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, p. 25.

³³ Musa Asy'arie, *Keluar dari Krisis Multidimensi*, (Yogyakarta: Lesfi, 2001), p. 76.

seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang baik, sesuai dengan aturan permainan yang sudah disepakati dan untuk tujuan-tujuan yang baik pula.

Etika politik menjadi keharusan dalam kehidupan politik, karena tanpa etika, tindakan politik bisa menjerumuskan seseorang pada tindakan kejahatan politik. Seperti konspirasi untuk menjatuhkan kekuasaan pemerintah secara inkonstitusional, ilegal, bahkan dengan cara-cara pembunuhan politik, teror dan kebrutalan politik.

Dalam kaitannya dengan agama, sering kali agama dijadikan kendaraan politik yang dilakukan oleh para politisi ataupun partai politik untuk mendapatkan dukungan dari pemeluk agama yang dianutnya. Agama sering kali dipakai sebagai alat legitimasi kekuasaan politik, dengan menggunakan ayat-ayat yang termaktub dalam kitab suci untuk membenaran terhadap ideologi politiknya, untuk mempengaruhi para pemeluk agama sesuai dengan apa yang diyakini oleh para pimpinan agamanya, dengan tujuan mengumpulkan suara untuk memenangkan kekuatan politik atau partai politik tertentu.³⁴

Elite politik disibukkan berbagai upaya berburu kekuasaan antara lain dengan memanfaatkan energi yang diberikan oleh agama. Agama adalah energi yang dahsyat untuk menopang kehendak berkuasa. Agama mensublimasikan dan mensakralkan dunia profan. Agama begitu menyebar di tengah kehidupan. Oleh karena itu, boleh dikata tak seorang pun yang hidupnya tanpa bersentuhan dengan agama. Antropolog dari Amerika, Clifford Geertz menyebutkan bahwa tingkat persebaran agama, khususnya Islam di Indonesia begitu luas, meski dia melihat intuisitas penghayatan masyarakat nusantara ini tak terlalu menggebu-gebu, melainkan berangsur-angsur, dan bahkan bagi komunitas tertentu, Jawa misalnya, berlangsung secara sinkretik.³⁵

Agama sering tampil dalam dua wajah yang saling bertentangan. Dari satu sisi, agama merupakan tempat di mana orang menemukan kedamaian, kedalaman hidup, dan harapan yang kokoh. Di dalam agama, banyak orang dan kelompok menimba kekuatan dan mendapatkan topangan berhadapan dengan penderitaan, penindasan, atau rezim totaliter. Dari sisi lain, agama sering dikaitkan dengan fenomena kekerasan, lebih-lebih di Indonesia pada akhir-akhir ini.³⁶

Agama yang disebut Burger sebagai payung suci (*the sacred canopy*) sebagaimana dikutip Zaenuddin, tidak saja digunakan untuk mencari legitimasi kekuasaan yang dimiliki elite, agama juga dipakai masyarakat untuk mendorong terjadinya perubahan. Dalam praktek, perubahan sosial

³⁴ *Ibid.*, p. 77.

³⁵ Zaenuddin Maliki, *Politikus Busuk*, p. 132.

³⁶ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, p. 63.

bukanlah praktik yang monolitik. Perubahan terjadi melalui berbagai cara dan kemungkinan.³⁷

Menurut Fazlurrahman tujuan utama diturunkannya al-Qur'an adalah: menegakkan tata masyarakat yang adil berdasarkan etika. Sedang fungsi al-Qur'an mencegah manusia melakukan kerusakan di muka bumi (*ijfsad*) dengan tenggelam ke dalam cara-cara dekadensi.³⁸

Tekad bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah A. Syafi'i Ma'arif dengan Ketua Umum PBNU K.H. Hasyim Muzadi sebagai dua sayap besar umat Islam Indonesia untuk melakukan gerakan moral pemberantasan KKN, adalah bagian dari upaya melakukan kontrol tidak hanya terhadap proses kepolitikan di negeri ini, tetapi juga dalam proses mereformasi tatanan kehidupan masyarakat yang bersih dari praktik KKN.

Masalah utama yang dihadapi sebagai bangsa adalah masalah moral, masalah akhlak. Etika pribadi, etika antar pribadi, etika umum, moralitas publik, akhlak pribadi, dan akhlak kolektif diberbagai bangsa terus menerus mengalami kemerosotan dan bahkan ada yang lebih skriptif lagi menganggapnya sudah mengalami keruntuhan total.

Hanya saja, persoalannya adalah bagaimana moralitas dan etika bermasyarakat dan berbangsa itu mesti diperbaiki. Salah satu jawaban yang ditawarkan ialah dengan memfungsikan agama menjadi sesuatu yang fungsional dalam kehidupan. Agama tidak hanya berfungsi dalam rangka kegiatan ritual, seremonial dan individual saja. Agama juga harus berfungsi dan difungsikan secara sosial.

Dalam perspektif Islam, merosotnya etika politik di era reformasi menjadi indikator masih relatif rendahnya kualitas keberagaman sementara elite politik negeri ini. Agama baru berfungsi secara ritual ceremonial dan individual. Agama belum berfungsi dan difungsikan secara total membangun sinergitas kesalahan spiritual dan sosial.

E. Penutup

Pada era reformasi telah terjadi kemerosotan etika politik. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya tiga fenomena yang sangat jelas, yaitu politik busuk dan pembusukan politik; masih meluas dan mengguritanya korupsi, kolusi, dan nepotisme; serta merebaknya kekerasan politik di tanah air.

³⁷ Zaenuddin Maliki, *Politikus Busuk*, p. 136.

³⁸ Fazlurrahman, *Tema Pokok al-Qur'an*, p. 77.

Etika atau akhlak yang di dalamnya termasuk etika politik, dalam pandangan Islam menempati posisi yang tinggi dan sentral dalam tata kehidupan bernasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika merupakan indikator derajat keimanan dan keberagamaan seseorang. Semakin tinggi etika seseorang mengindikasikan semakin tingginya kualitas keimanan dan keberagamaan seseorang, dan sebaliknya.

Etika politik dalam perspektif Islam terbangun sekurang-kurangnya di atas empat pilar, yaitu: kejujuran, amanah, keadilan, dan kesantunan. Carut-marutnya realitas politik di tanah air, menjadi indikator masih relatif rendahnya kualitas keimanan dan keberagamaan sementara elite politik Indonesia. Keberagamaan baru berfungsi sebagai ritual, seremonial, individual, belum difungsikan secara total untuk membangun sinergisitas kesalihan spiritual individual dan kesalihan sosial.

Daftar Pustaka

- Asy'arie, Musa, *Keluar dari Krisis Multidimensi*, Yogyakarta: Lesfi, 2001.
- Ba'asir, Faisal, *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim*, Jakarta: Sinar Harapan, 2003.
- Bertens, K., *Perspektif Etika: Esai-esai tentang Masalah Aktual*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002.
- Chang, William, *Kerikil-kerikil di Jalan Reformasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Fazlurrahman, *Tema Pokok al-Qur'an*, alih bahasa Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1995.
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Maliki, Zaenuddin, *Politikus Busuk*, Yogyakarta: Bentang Press, 2004.
- Maraghi, Ahmad Mustafa al-, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1974.
- Ridla, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.
- Siregar, Hariman, *Gerakan Mahasiswa Pilar ke-5 Demokrasi*, Jakarta: Teplok Press, 2003.
- Sumardjan, Selo, *Menuju Indonesia Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Majalah/Koran

Tempo, 18 Januari 2004

Gatra, 8 Mei 1999

Kompas, 27 Oktober 2000

Kedaulatan Rakyat, 29 Maret 2004, 6 Juli 2004, 18 September 2004, 24 Agustus 2004, 24 Agustus 2004, 3 Maret 2004